

TAJUK RENCANA

Mempersoalkan Gugatan Anwar Usman

ADA fenomena menarik dalam kasus pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Anwar Usman tidak terima atas keputusan tersebut dan melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Anwar menggugat Ketua MK yang baru, Suhartoyo karena dinilai pengangkatannya tidak sah. Bagaimana mungkin, putusan yang bersifat etik dipersoalkan di PTUN ?

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie pun mengomentari bahwa gugatan Anwar Usman salah alamat atau salah sasaran. Ia mengingatkan bahwa objek yang dinilai di pengadilan hukum adalah pelanggaran hukum (KR 8/7). Padahal, yang dilakukan Anwar Usman adalah pelanggaran etik, bukan pelanggaran hukum, sehingga sudah tepat bila diperiksa MKMK, bukan pengadilan hukum.

Tentu lain soal bila pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK melalui keputusan presiden atau Keppres. Faktanya, Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK melalui putusan MKMK, sedang pengantinya yakni Suhartoyo disepakati lewat rapat internal di MK. Keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK pun tidak melalui Keppres, melainkan cukup di internal MK.

Atas kondisi tersebut, Anwar Usman tidak terima dan melakukan perlawanan dengan menggugat melalui PTUN. MKMK sendiri sudah mengatakan bahwa putusannya bersifat final sehingga PTUN tak berwenang mengadili putusan MKMK, karena perkaranya bersifat etik, bukan hukum. Sebaliknya, MKMK juga tidak berwenang mencampuri kom-

petensi absolut PTUN dalam memeriksa dan memutus perkara terkait pemberhentian Anwar Usman.

Kita sangat yakin, Anwar Usman bukan tidak tahu tentang kompetensi absolut PTUN bahwa lembaga peradilan tersebut hanya menangani perkara yang berkaitan dengan putusan administrasi yang mengandung unsur hukum, bukan etik. Kita tak tahu persis motivasi Anwar Usman mengapa mengajukan gugatan ke PTUN terkait pemberhentiannya sebagai Ketua MK. Kondisinya tentu akan berbeda bila Anwar Usman diberhentikan sebagai hakim MK yang kemudian dikeluarkan Keputusan Presiden. Bila itu yang terjadi, barulah relevan bila Anwar Usman mengajukan gugatan ke PTUN.

Kita berharap lembaga penegakan hukum khususnya di pengadilan, memberi contoh kepada masyarakat tentang pentingnya ketaatan pada hukum, termasuk dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Jangan sampai lembaga peradilan memeriksa dan memutus perkara di luar kompetensi absolutnya. Tatanan hukum ini tidak boleh dilanggar, melainkan harus dipatuhi seluruh aparat penegak hukum.

Konkretnya, kita berharap PTUN menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara di luar kompetensi absolutnya. Sebab, apa yang diajukan (digu- gat) Anwar Usman sesungguhnya bukanlah objek sengketa yang dapat diputus PTUN, melainkan menjadi kewenangan MKMK karena menyangkut etik, bukan hukum. Dengan kata lain, PTUN hendaknya tidak memaksakan diri memeriksa dan memutus perkara yang bukan masuk kompetensinya. Sehingga tidak terjadi PTUN salah memutus perkara yang notabene bukan kewenangannya. □-d

GERAKAN boikot terhadap Israel menjadi salah satu topik paling banyak dibicarakan di dunia internasional saat ini, termasuk di Indonesia. Boikot dilihat sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang mengalami penderitaan di bawah penjajahan Israel. Tindakan ini dimaksudkan sebagai alat tekanan non-kekerasan untuk mendorong Israel menghentikan kebijakan-kebijakan yang melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional.

Namun di balik semangat kemanusiaan yang melandasi gerakan boikot ini, ada dimensi politik dan bisnis yang tak dapat diabaikan. Israel merupakan salah satu negara dengan ekonomi yang kuat di berbagai sektor, termasuk teknologi tinggi, militer, dan keamanan. Hubungan bisnis yang kuat dengan berbagai perusahaan internasional menambah kompleksitas dalam pelaksanaan boikot. Perusahaan dan negara-negara dengan kepentingan ekonomi di Israel sering menghadapi dilema antara mendukung gerakan kemanusiaan dan mempertahankan hubungan bisnis yang menguntungkan.

Muncul pertanyaan mendasar: apakah boikot sepenuhnya didorong oleh komitmen kemanusiaan, ataukah ada unsur kepentingan bisnis yang mempengaruhinya? Dalam konteks ini, memahami motivasi dan implikasi dari gerakan boikot menjadi sangat penting.

Komitmen Kemanusiaan

Boikot terhadap Israel didorong oleh kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia. Mereka menilai kebijakan Israel terhadap Palestina, termasuk pembangunan pemukiman ilegal di wilayah pendudukan, pelanggaran hak asasi manusia, dan blokade terhadap Gaza, merupakan tindakan yang tak bisa dibiarkan. Sebagai manusia, tentu kita semua terpenggil untuk mendukung gerakan ini jika dilandasi dengan semangat kemanusiaan.

Gerakan BDS (*Boycott, Divestment, Sanctions*) adalah salah satu inisiatif global yang berupaya mengakhiri dukungan terhadap Israel sampai negara tersebut memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai hukum internasional. Bagi banyak orang, bergabung dalam gerakan ini merupakan bentuk komitmen terhadap keadilan dan kemanusiaan, serta solidaritas terhadap rakyat Palestina yang tertindas.

Bagi para pendukung boikot, aksi ini merupakan cara untuk menunjukkan bahwa komunitas internasional tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan dan penindasan yang berlangsung. Dengan demikian, boikot ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memajukan perdamaian yang adil di wilayah tersebut.

Politik Persaingan Bisnis

Sayangnya, gerakan boikot ini terselip

Edo Segara Gustanto

sebuah politik persaingan bisnis. Di balik semangat kemanusiaan yang mendasari gerakan boikot, terdapat elemen-elemen bisnis yang turut mempengaruhi dinamika di lapangan. Saat satu produk dari Israel diboikot, produk serupa dari negara lain bisa mendapatkan keuntungan dari pengalihan permintaan konsumen. Kondisi ini menciptakan peluang bagi kompetitor untuk meningkatkan pangsa pasar mereka, terkadang dengan memanfaatkan situasi boikot sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka.



KR-JOKO SANTOSO

Namun cikalanya, persaingan ini sering kali dipicu oleh perusahaan-perusahaan dengan cara-cara yang tidak patut. Beberapa perusahaan memanfaatkan momentum boikot untuk menjatuhkan kompetitor mereka yang terdampak. Praktik ini tidak hanya mencakup kampanye pemasaran yang agresif, tetapi juga penyebaran informasi yang merugikan tentang produk yang diduga terkait Israel. Meski dalam dunia marketing, strategi seperti ini dikenal dengan istilah *ëRiding the Wavei* (menaiki gelombang), yang pada dasarnya dianggap normal, situasi menjadi tidak etis ketika perusahaan sengaja menggunakan taktik-taktik kotor untuk memanfaatkan sentimen publik dan menekan kompetitor secara tidak adil.

Fenomena ini menunjukkan bahwa gerakan boikot yang seharusnya didasari komitmen terhadap keadilan dan hak asasi manusia, juga bisa diselewangkan oleh motif-motif bisnis. Politik persaingan bisnis ini menodai tujuan mulia boikot, karena fokusnya bergeser dari upaya kemanusiaan ke kepentingan komersial. Karena itu, penting bagi pendukung gerakan boikot untuk waspada terhadap eksploitasi semacam ini dan memastikan bahwa tindakan mereka benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusi-

Penguatan Etika dalam Industri Pariwisata

BIASANYA motif seseorang melakukan perjalanan wisata untuk mendapatkan kontribusi yang sesuai dengan apa yang telah dikorbankannya. Namun motivasi berwisata pada akhirnya menentukan naik ataupun turunnya penawaran di dalam industri pariwisata. Pandangan Abraham Maslow mengenai teori hierarki kebutuhan secara intrinsik semakin memperkuat terbentuknya motivasi berwisata publik yang pada prinsipnya berangkat dari keinginan diri setiap manusia.

Tetapi kehadiran wisatawan di sebuah destinasi sering juga tidak diimbangi dengan tingkat keamanan hingga kenyamanan sebagai prioritas yang perlu terus dipastikan oleh pihak penyelenggara maupun oleh masyarakat lokal. Kunjungan wisatawan bukan sekadar menjawab kebutuhan industri yang ditopangnya saja, bahkan berbagai persoalan yang merugi kerap menerpa wisatawan seperti : kehadiran juru parkir liar dengan tarif di luar kenormalan, viralnya pedagang yang mematok harga secara sepihak, ataupun pelanggaran yang berulang kali terjadi di kawasan bebas asap rokok.

Walaupun di lain kesempatan, etika berwisata merupakan perilaku sosial yang harus disadari sepenuhnya bagi seluruh pihak yang terlibat di dalam kegiatan itu. Pertumbuhan industri pariwisata yang berkelanjutan sejauh ini memang masih membutuhkan pendampingan sekaligus pembelajaran konkrit terutama bagi para pelaku usahanya, karena bila menyoal keberadaan pariwisata modern tidaklah lepas dari unsur bisnis yang sangat kompleks.

Agar tidak bersifat musiman, refleksi kegiatan pariwisata dalam negeri perlu dilakukan dengan upaya yang penuh daya tarik berbasis tren, tetap bernilai kemanusiaan, serta berwawasan ramah lingkungan. Mengapa demikian ? Etika dalam berwisata merupakan hal krusial

Dyaloka Puspita Ningrum

yang masih diwarnai dengan kesenjangan di berbagai objeknya. Tidak jarang kunjungan wisatawan di suatu destinasi pun cukup banyak ditunjukkan dengan minimnya dukungan untuk terus mempersiapkan kawasan tujuan wisata yang potensial. Situasi ini tentu tidak sejalan dengan kebutuhan berwisata yang memang terbuka bagi semua kalangan usia. Ironisnya diskriminasi terhadap pemenuhan hak-hak berwisata di area publik bagi kelompok rentan adalah kenyataan yang dalam praktiknya harus terus dipikirkan secara bersama.

Advokasi Digital

Seperti efek bola salju, promosi maupun *branding* pariwisata di era yang semakin disruptif sangat berpengaruh pada kedatangan wisatawan di suatu tempat dengan segala kepentingannya. Hal ini ditunjukkan atas hiruk pikuk industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia yang kembali menunjukkan indeks kinerja dengan prestasi membanggakan ke-22 di tingkat dunia *Economic Forum* pada Mei 2024 lalu. Peran media digital yang mudah dan murah dengan akses internet yang memadai diyakini efektif dalam membentuk *awareness* bagi para penggunanya. Oleh sebab itu paparan informasi di media digital dengan animo wisatawan sungguh menjadi momentum yang harus dijaga, termasuk melalui partisipasi publik yang berkeadilan.

Kunjungan wisatawan pada dasarnya sangat mendukung ekonomi lokal. Namun konteks berwisata yang berpegang dengan etika di tengah arus globalisasi sekarang adalah kontrol sosial untuk mengendalikan hasrat berwisata yang menyimpang. Menguatkan

aan yang ingin mereka perjuangkan.

Kompleksitas dan Tantangan

Kompleksitas politik persaingan bisnis dalam konteks boikot Israel sangat mendalam dan melibatkan berbagai aspek ekonomi, etika, dan diplomasi. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana perusahaan-perusahaan dari negara lain memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan mereka sendiri.

Tantangan lain, bagaimana memastikan tindakan boikot tetap berada dalam koridor etis dan tidak diselewangkan untuk kepentingan bisnis semata. Ada risiko besar bahwa gerakan boikot yang didorong oleh alasan kemanusiaan dan hak asasi manusia dapat dimanipulasi oleh entitas bisnis yang ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Ini dapat mencakup kampanye hitam, penyebaran informasi yang menyesatkan, dan taktik-taktik tidak etis lainnya untuk menjatuhkan pesaing yang terkait dengan Israel. Tantangan ini memerlukan upaya untuk menjaga integritas gerakan boikot dan memastikan bahwa tujuan utamanya tidak terdistorsi oleh agenda komersial.

Ada juga tantangan diplomatik yang harus dihadapi. Banyak negara memiliki hubungan ekonomi dan politik yang kompleks dengan Israel, dan boikot dapat mempengaruhi hubungan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara global harus menavigasi lanskap diplomatik yang rumit, di mana keputusan untuk memboikot atau tidak memboikot produk Israel dapat berdampak pada hubungan mereka dengan pemerintah dan konsumen di berbagai negara.

Akhirnya, keberhasilan gerakan boikot bukan hanya tentang menghukum Israel, tetapi juga tentang menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Ini membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, baik individu, organisasi, maupun negara, untuk berdiri di sisi keadilan dan kemanusiaan, meski harus menghadapi berbagai tantangan dan risiko. □-d

*) **Edo Segara Gustanto SE ME.,** Mahasiswa Hukum Islam Program Doktor UII/ Peneliti PS2PM Yogyakarta. *Artikel diterbitkan atas kerjasama Kedaulatan Rakyat dengan PS2PM Yogyakarta dan Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan foto-copy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912- 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH.

Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana. **SE. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, **SE, MM. Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSL, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkyk23@yahoo.com, iklankrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasaa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Pojok KR

Dekati Pilkada 2024, KPU diingatkan benahi Sirekap.

-- Yang membenahi harus punya komitmen kuat.

Jimly Asshiddiqie nilai gugatan Anwar Usman salah alamat.

-- Anwar Usman pasti sudah tahu soal itu.

Bawaslu Kota Yogya antisipasi 10 potensi persoalan Pilkada 2024.

-- Tak cukup diucapkan.

Beraks